

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Kapasitas Badan Pengawas Pemilu dalam Upaya Mendorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah dugaan pelanggaran pemilu pada tahun 2020 yang lebih banyak daripada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif dalam melakukan pencegahan pelanggaran masih belum baik. Penyediaan informasi pada laman PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) Bawaslu Kabupaten Purbalingga masih kurang karena ada beberapa dokumen informasi yang tidak lengkap dan tidak dapat diakses.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas Bawaslu dalam upaya mendorong pengawasan partisipatif masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini melihat aspek-aspek kapasitas yang dikemukakan oleh Horton, dkk yang terdiri dari kapasitas sumberdaya (*resources*) meliputi *staff members* (sumber daya manusia), *infrastructure* (infrastruktur), *technology* (teknologi), dan *financial resources* (sumber daya keuangan) dan kapasitas manajemen (*management*) meliputi *strategic leadership* (kepemimpinan strategis), *program and process management* (manajemen program dan proses), dan *networking and linkages* (jaringan-jaringan dan pertalian kerja). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam upaya mendorong pengawasan partisipatif masyarakat di Kabupaten Purbalingga sudah baik meskipun ada beberapa aspek kapasitas yang belum sepenuhnya terpenuhi. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kapasitas Bawaslu Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan dalam upaya mendorong pengawasan partisipatif masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Kata Kunci: Kapasitas, Pengawasan, Partisipatif

SUMMARY

The title of this research is the Capacity of the Election Supervisory Board in Efforts to Encourage Community Participatory Supervision in Purbalingga Regency. The title is motivated by the number of alleged election violations in 2020 which is more than in 2019. This shows that participatory supervision in preventing violations is still not good. The provision of information on the PPID (information and documentation management officer) page of the Purbalingga Regency Bawaslu is still lacking because there are several incomplete and inaccessible information documents.

The purpose of this study was to describe the capacity of Bawaslu in an effort to encourage community participatory supervision in Purbalingga Regency. This study looks at the capacity aspects proposed by Horton, et al which consist of resource capacity including staff members (human resources), infrastructure (infrastructure), technology (technology), and financial resources (financial resources) and capacity management (management) includes strategic leadership (strategic leadership), program and process management (program and process management), and networking and linkages (networks and work ties). The research method used in this research is descriptive qualitative method. The informant selection technique in this study used purposive sampling and snowball sampling. Data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate that the capacity of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in an effort to encourage community participatory supervision in Purbalingga Regency is good, although there are several aspects of capacity that have not been fully fulfilled. However, this does not affect the capacity of the Bawaslu of Purbalingga Regency as a whole in an effort to encourage participatory supervision of the people of Purbalingga Regency.

Keywords: Capacity, Supervision, Participatory